

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

- HM. Pudjihardjo* **MENCIPTAKAN DAYA TARIK INVESTASI UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI**
- Iwan Setya Putra* **PENGUNAAN *ECONOMIC VALUE ADDED (EVA)* DAN *Z-SCORE* SEBAGAI METODE PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**
- Siti Sunrowiyati* **ANALISIS PENGARUH PEMILIHAN METODA AKUNTANSI TERHADAP TINGKAT *UNDERPRICING* SAHAM PERDANA**
- Rony Ika Setiawan* **PENGARUH IKLAN DAN MEREK SEPEDA MOTOR SUZUKI TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN**
- Aris Sunandes* **ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN UMUM DI KANTOR KECATAMAN WATES KABUPATEN BLITAR**
- Hadi Utomo* **POTRET DINAMIKA EKONOMI PROVINSI JAWA TIMUR SEKTOR KEUANGAN DAN SEKTOR PERDAGANGAN UNTUK PERIODE TAHUN 2004-2008**
- Retno Murni Sari* **PENGARUH BEBERAPA FAKTOR KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

[Vol 2, No. 1]

Hal. 1 - 83

Juni 2010

ISSN 2088-6268

Diterbitkan oleh:
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESUMA NEGARA BLITAR
Jl. Mastrip 59 Blitar 66111, Telp./Fax : (0342) 802330/813779
Email : info@stieken.ac.id

[STIE KESUMA NEGARA BLITAR]

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

Daftar Isi:

- HM. Pudjihadjo*** **MENCIPTAKAN DAYA TARIK INVESTASI UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI (Hal. 1 - 8)**
- Iwan Setya Putra*** **PENGUNAAN *ECONOMIC VALUE ADDED (EVA)* DAN *Z-SCORE* SEBAGAI METODE PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Hal. 9 - 22)**
- Siti Sunrowiyati*** **ANALISIS PENGARUH PEMILIHAN METODA AKUNTANSI TERHADAP TINGKAT *UNDERPRICING* SAHAM PERDANA (Hal. 23 - 33)**
- Rony Ika Setiawan*** **PENGARUH IKLAN DAN MEREK SEPEDA MOTOR SUZUKI TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (Hal. 34 - 52)**
- Aris Sunandes*** **ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN UMUM DI KANTOR KECATAMAN WATES KABUPATEN BLITAR (Hal. 53 - 61)**
- Hadi Utomo*** **POTRET DINAMIKA EKONOMI PROVINSI JAWA TIMUR SEKTOR KEUANGAN DAN SEKTOR PERDAGANGAN UNTUK PERIODE TAHUN 2004-2008 (Hal. 62 - 71)**
- Retno Murni Sari*** **PENGARUH BEBERAPA FAKTOR KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG (HAL. 72 - 83)**

MENCIPTAKAN DAYA TARIK INVESTASI UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

HM. Pudjihardjo

Abstraksi: Investasi mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian diperlukan berbagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar para investor bersedia menanamkan modalnya.

Upaya itu diantaranya adalah memperbaiki kelembagaan, menciptakan stabilitas (mencakup stabilitas politik, stabilitas sosial budaya, dan stabilitas keamanan), kondisi ketenagakerjaan yang baik, serta ketersediaan infrastruktur fisik.

Dalam upaya meningkatkan investasi, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah positif dalam menciptakan iklim investasi yang baik di daerah. Diantaranya adalah dengan melakukan reformasi birokrasi layanan investasi, membangun sistem informasi potensi investasi, serta peningkatan provisi infrastruktur fisik.

Kata Kunci: *investasi, pertumbuhan ekonomi*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi atau penanaman modal dalam pembangunan telah banyak membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Manfaat investasi sangat dirasakan untuk negara sedang berkembang karena kemampuan dalam menyediakan modal yang relatif rendah. Padahal, di sisi lain, usaha untuk mempercepat pembangunan ekonomi memerlukan modal yang sangat besar.

Oleh karena itu, salah satu aspek dalam kebijakan pembangunan perlu melakukan berbagai upaya untuk menarik investasi agar memperoleh lebih banyak dana untuk pembangunan.

Arus modal untuk pembangunan dapat dibedakan pada arus modal dalam negeri yang bersumber dari tabungan sukarela masyarakat maupun tabungan pemerintah. Sedangkan yang berasal dari luar negeri meliputi bantuan luar negeri, pinjaman luar negeri, dan penanaman modal asing (*foreign investment*).

Bantuan dan pinjaman luar negeri dapat bersumber dari pemerintah negara asing dan badan badan internasional. Sedangkan penanaman modal asing (*foreign investment*) umumnya berasal dari pihak swasta (**Sukirno**; 304; 2006).

Penanaman modal asing yang dilakukan pihak swasta (*private foreign investment*) berupa penanaman modal swasta asing langsung (*foreign direct investment*/FDI). FDI biasanya dilakukan oleh perusahaan perusahaan multinasional yang kantor pusatnya berada di negara maju tempat asalnya, sedangkan cabang operasi atau anak perusahaannya tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Dana investasi ini langsung diwujudkan dalam bentuk pengadaan fasilitas produksi, pembelian mesin-mesin, dll. Selain itu penanaman modal asing juga ada yang berbentuk investasi portofolio, yakni dana investasi yang ditanamkan pada aneka instrumen keuangan seperti saham, obligasi, sertifikat deposito, dsb.

Di era globalisasi, penanaman modal swasta asing langsung merupakan salah satu faktor utama pendorong perekonomian negara. Selain manfaat yang langsung dapat dirasakan seperti pembukaan lapangan kerja baru, transfer teknologi, peningkatan ekspor dan pendapatan pemerintah, FDI juga memberikan sinyal positif di lingkungan usaha yang akan memicu investor untuk berinvestasi lebih besar.

Indonesia memerlukan pendanaan dalam jumlah besar untuk menggerakkan roda perekonomian dalam negeri sehingga kesejahteraan penduduknya dapat meningkat seperti sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997.

Indonesia termasuk dalam 10 negara penerima FDI terbesar sejak tahun 1970-1997. Akan tetapi dengan adanya krisis ekonomi, dana FDI semakin berkurang hingga tahun 2002-2003. Kondisi ini menyebabkan Indonesia sudah tidak termasuk lagi dalam 10 negara utama penerima FDI.

Hal ini sangat beralasan sebab perusahaan multinasional akan lebih tertarik menanamkan modalnya (FDI) pada negara-negara atau kawasan yang menjanjikan tingkat hasil finansial dan kadar kepastian yang tinggi. Artinya negara yang beban utangnya sudah menggunung, pemerintahannya tidak stabil, reformasi ekonominya masih tahap awal, maka risiko hilangnya modal yang ditanamkan sangatlah besar. Di sisi lain, perusahaan multinasional hanya berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dari investasi yang ditanam.

Sebetulnya kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif setelah dilanda krisis pada pertengahan tahun 1997. Namun pertumbuhan rata-rata per tahunnya relatif masih lambat bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang sebelumnya juga terkena krisis ekonomi, seperti Korea Selatan dan Thailand.

Salah satu penyebabnya adalah masih belum intensifnya kegiatan investasi, termasuk arus investasi dari luar (terutama investasi dalam bentuk penanaman modal asing). Pengalaman masa Orde Baru telah menunjukkan bahwa investasi, khususnya penanaman modal asing (PMA), telah banyak mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa sumber perkembangan teknologi, perubahan struktural, diversifikasi produk, dan pertumbuhan ekspor di Indonesia selama masa Orde Baru sebagian besar karena kehadiran PMA di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya pemulihan investasi di Indonesia. Faktor tersebut mulai dari masalah keamanan, tidak adanya kepastian hukum, kondisi infrastruktur yang buruk, hingga kondisi perburuhan yang semakin buruk.

Padahal sebelum krisis yang bersifat multidimensi melanda, Indonesia termasuk salah satu negara yang banyak diminati oleh banyak investor, baik investor luar negeri maupun investor dari dalam negeri.

Tetapi setelah krisis, Indonesia mengalami pelarian modal yang cukup besar ke luar negeri, sehingga Indonesia termasuk dalam kuadran *low performance* dan *low potensial* berdasarkan data *matrix of inward FDI performance and potential* periode tahun 2002-2004 yang diterbitkan oleh UNCTAD. Ini artinya, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura, Indonesia jauh tertinggal dalam menarik dana dari luar negeri.

Sejalan dengan itu, Bank dunia memberikan penilaian tersendiri terhadap Indonesia dari sisi investasi, yakni sebagai salah satu negara yang memiliki iklim investasi yang buruk, sehingga banyak investor yang kurang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Iklim investasi yang dimaksud meliputi stabilitas ekonomi, kepastian hukum, stabilitas sosial politik, stabilitas keamanan, sistem perpajakan, regulasi, korupsi, ketersediaan SDM terampil, dan ketersediaan infrastruktur (jalan, listrik, pelabuhan, telekomunikasi, dsb.).

Dengan demikian, Indonesia harus mencari jalan keluar dan menata diri guna mengembalikan kepercayaan para investor, baik investor luar negeri maupun investor dalam negeri.

B. Wacana Investasi

Pada dasarnya, keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia tergantung pada persepsi dan tuntutan atas faktor-faktor yang memengaruhi iklim investasi itu sendiri. Akan tetapi salah satu tantangan terbesarnya adalah sistem investasi yang rumit dan penanganan yang belum terkoordinasi oleh begitu banyak lembaga terkait.

Regulasi saling berbenturan. Belum lagi rendahnya "sense of responsibility" karena kepentingan sendiri/kelembagaan relatif di atas kepentingan rakyat secara luas. Perbaikan iklim investasi merupakan prioritas utama yang harus dikerjakan, baik di sektor publik maupun swasta.

Disamping hal tersebut, dunia usaha tidak bisa dipaksa untuk berinvestasi di suatu wilayah. Mereka akan memilih wilayah yang berprospek positif sesuai dengan kalkulasinya. Dalam hal ini investor seakan memegang kunci untuk pertumbuhan ekonomi.

Investasi dalam perekonomian berfungsi sebagai *injection* untuk menggairahkan perekonomian. Dalam persamaan makroekonomi $Y = C + I + G + (X - M)$, mengandung maksud pendapatan nasional (Y) akan meningkat jika variabel sebelah kanan (yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan selisih ekspor dengan impor) ikut meningkat.

Dari berbagai analisis yang dikemukakan oleh para ekonom, variabel yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan adalah variabel investasi (I).

II. PEMBAHASAN

A. Pentingnya Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

Sejak awal tahun 1970-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi yang didorong oleh peningkatan investasi dan perluasan sektor industri. Dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997/1998, telah memperlemah sistem keuangan dan pemerintahan yang menyebabkan penurunan investasi dan perlambatan perkembangan sektor swasta yang berdampak pada penurunan perekonomian secara umum.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah ini tidak mampu meningkatkan pendapatan masyarakat maupun menurunkan tingkat kemiskinan. Salah satu cara untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sekitar 7% pertahun yaitu dengan memperbaiki iklim investasi yang dalam kurun waktu terakhir ini kurang kondusif.

Iklim investasi menyangkut semua kebijakan, kelembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko investasi. Secara sederhana dapat pula dikatakan bahwa iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang.

Dengan kata lain, iklim usaha atau investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan risiko serendah mungkin dan bisa menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang.

Ada beberapa faktor-faktor penghambat pertumbuhan investasi. Di Indonesia dan sejumlah negara lainnya di Asia, faktor-faktor penghambat pertumbuhan investasi memiliki gambaran sedikit berbeda, seperti terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1:
Problema utama Investasi di beberapa Negara (dalam %)

Problem	Thailand	Malaysia	Singapura	Indonesia	Filipina	Vietnam	India
Infrastruktur buruk	15,6	23,6	3,1	54,7	75,5	63,8	72,2
Kebijakan tak pasti	9,5	16,5	6,3	67,7	47,9	61,3	14,8
Perpajakan rumit	46,3	11,0	12,5	72,0	20,9	40,0	55,6
Prosedur dagang rumit	62,8	33,9	21,4	67,6	37,1	56,8	58,5
Upah makin mahal	41,6	52,1	54,0	86,4	36,5	29,5	55,7
Perburuhan kurang baik	7,1	6,6	1,1	37,0	25,7	11,5	26,6

Sumber: www.kadin-Indonesia.or.id

Dari Tabel 1 tersebut di atas, terlihat bahwa faktor terbesar penghambat pertumbuhan investasi di Indonesia adalah upah buruh yang makin mahal, kebijakan yang tidak pasti/tidak jelas, serta rumitnya system perpajakan.

Untuk di Malaysia dan Singapura, faktor terbesar penghambat pertumbuhan investasi adalah upah yang mahal merupakan masalah yang paling besar dihadapi pengusaha.

Di Thailand faktor terbesar penghambat pertumbuhan investasi adalah prosedur perdagangan yang rumit. Sedangkan di Filipina, Vietnam dan India, faktor terbesar penghambat pertumbuhan investasi adalah infrastruktur yang buruk.

Untuk Indonesia, permasalahan perburuhan, mulai dari tingkat upah yang terus meningkat akibat penerapan kebijakan upah minimum, kualitas sumberdaya manusia yang rendah, termasuk rendahnya penguasaan atas teknologi, hingga sering terjadinya pemogokan buruh yang membuat kerugian besar bagi perusahaan-

perusahaan. Hal ini jelas akan menurunkan minat calon investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

B. Daya Saing Ekonomi

Daya saing merupakan kata kunci yang selalu menjadi bahan perdebatan para ekonom. Dalam publikasi *Global Competitiveness Report 2007-2008*, disebutkan bahwa daya saing ekonomi Indonesia tahun 2007 berada pada urutan ke 54 dari 131 negara, setelah pada tahun 2006 sempat mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2005, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2:
Peringkat Daya Saing Ekonomi Dari 131 Negara

Negara	2005	2006	2007
Singapura	5	8	7
Malaysia	25	19	21
Thailand	33	28	28
Indonesia	69	54	54
Filipina	73	75	71
Vietnam	74	64	68
Kamboja	111	106	110
Timor Leste	113	120	127

Sumber: *World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2006 & 2007*

Dilihat dari daya saing produk unggulan Indonesia dibandingkan dengan dunia, tampak terlihat penyebab rendahnya daya saing. Dari survey yang dilakukan, harga komoditas unggulan Indonesia lebih tinggi sekitar 22% dibanding harga dunia. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi (dan/atau margin keuntungan) produsen penghasil produk tersebut masih belum mampu menyaingi produk sejenis di pasaran luarnegeri. Akibatnya harga domestik produk produk manufaktur jauh lebih tinggi dibandingkan harga internasional.

Disamping itu, kondisi infrastruktur, institusi, dan pendidikan dasar yang buruk berkontribusi pada tidak membaiknya daya saing ekonomi Indonesia. Dalam survey WEF tahun 2007 disebutkan bahwa faktor utama yang menghambat bisnis di Indonesia adalah infrastruktur yang buruk dan diikuti dengan birokrasi pemerintah yang dinilai belum efisien. Kualitas institusi di Indonesia dinilai rendah berdasarkan hasil survey *Transparency Internasional* mengenai persepsi korupsi yang menempatkan Indonesia berada pada peringkat 134 terkorup di dunia dari 163 negara. Sementara itu dari hasil survey Bank Dunia, ditemukan sejumlah hambatan dalam proses memulai usaha di Indonesia, yang meliputi jumlah prosedur, waktu, dan biaya yang dibutuhkan untuk memulai usaha.

Situasi yang sama juga terungkap dari hasil survey *International Institute for Management Development (IMD)* dalam publikasinya *World Competitiveness Yearbook* tahun 2007, yang menunjukkan bahwa daya saing ekonomi Indonesia tidak mengalami perbaikan, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3:
Peringkat Daya Saing Hasil Survei Internasional

NEGARA	2007	2006	2005	2004	2003
USA	1	1	1	1	1
Singapore	2	3	3	2	4
Hongkong	3	2	2	6	40
China	15	18	31	24	29
Taiwan	18	17	11	12	17
Malaysia	23	22	28	16	21
India	27	27	39	34	50
Korea	29	32	29	35	37
Thailand	33	29	27	29	30
Philippines	45	42	49	52	49
Brazil	49	44	51	53	52

South Africa	50	44	46	49	47
Argentina	51	47	58	59	58
Poland	52	58	57	57	55
Croatia	53	59	-	-	-
Indonesia	54	52	59	58	57
Venezuela	55	53	60	60	59
Jumlah Negara	55	55	60	60	59

Sumber: *International for Management Development (IMD)*

Indonesia mengalami penurunan peringkat daya saing dari peringkat 52 pada tahun 2006 menjadi peringkat 54 dari 55 negara pada tahun 2007. Adapun kriteria IMD dalam menilai tingkat daya saing suatu negara terdiri dari indikator seperti kinerja perekonomian, tingkat efisiensi pemerintah, legitimasi dunia usaha, tingkat efisiensi dunia usaha, dan infrastruktur.

Posisi Indonesia hanya unggul satu tingkat di atas Venezuela, dan beberapa angka di bawah Argentina, Polandia, dan Kroasia. Terlebih lagi apabila dibandingkan dengan negara-negara sesama ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, maka posisi Indonesia jauh tertinggal di bawahnya.

Mahalnya memulai bisnis merupakan salah satu penyebab memburuknya iklim investasi di Indonesia. Dalam laporan Bank Dunia yang berjudul *Doing Business in 2006* diungkapkan bahwa untuk memulai bisnis di Indonesia, para pemodal membutuhkan waktu sekitar 151 hari. Angka tersebut sedikit lebih cepat bila dibandingkan dengan Laos. Waktu yang dibutuhkan tersebut memang terkesan sangat panjang karena para investor harus melalui birokrasi yang rumit dengan melewati 12 prosedur, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.

Adanya prosedur yang berbelit-belit ini menyebabkan para calon investor kurang tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Sebab hal ini berujung pada banyaknya kesempatan yang terbuang saat memulai usaha dan ini agak menyimpang dari motif utama para investor dalam berinvestasi, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan.

Tabel 4:
Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis

Negara	Jumlah Prosedur	Jumlah Hari	Biaya * (Us\$)
Banglades	8	35	91,0
Kamboja	11	94	480,1
China	12	41	14,5
Hongkong	5	11	3,4
India	11	89	49,5
Indonesia	12	151	130,7
Korea Selatan	12	22	17,7
Laos	9	198	18,5
Malaysia	9	30	25,1
Filipina	11	50	19,5
Singapura	7	8	1,2
Srilangka	8	50	19,5
Taiwan	8	48	6,3
Thailand	8	33	6,7
Vietnam	11	56	28,6

Sumber: *World Bank (2005)*

C. Menciptakan Daya Tarik Investasi di Daerah

Dalam konteks pembangunan daerah, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi dan adanya iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi juga dipengaruhi oleh kondisi

makroekonomi suatu negara atau daerah. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda perekonomian.

Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi, salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya untuk memenangkan persaingan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam menarik investor, selain makroekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumberdaya manusia dan infrastruktur dalam artian luas.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh daerah terkait dengan upaya untuk menciptakan daya tarik terhadap investasi, antara lain:

1. Faktor kelembagaan yang mencakup kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal perumusan kebijakan, pelayanan publik, kepastian dan penegakan hukum, serta pembangunan daerah.
2. Faktor sosial politik, mencakup masalah Keamanan, faktor sosial, faktor politik, dan faktor budaya masyarakat.
3. Faktor ekonomi daerah, mencakup potensi ekonomi dan struktur ekonomi.
4. Faktor tenaga kerja dan produktifitas, meliputi ketersediaan tenaga kerja, biaya tenaga kerja, dan produktifitas tenaga kerja.
5. Faktor infrastruktur fisik, meliputi ketersediaan infrastruktur fisik, kualitas dan akses terhadap infrastruktur fisik.

Faktor ini dikategorikan sebagai faktor lingkungan dimana kegiatan bisnis beroperasi. Secara umum lingkungan bisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan langsung dan lingkungan yang lebih luas.

Lingkungan yang lebih luas adalah lingkungan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap suatu kegiatan bisnis, yang terdiri dari komponen-komponen berikut:

- a. *Ekonomi makro*, seperti: kebijakan perdagangan, kebijakan industri, kebijakan sektor keuangan, serta kebijakan fiskal dan moneter.
- b. *Pemerintah dan politik pada tingkat nasional dan lokal*, misalnya: legislatif dan proses pembuatan kebijakan, keamanan, dan stabilitas.
- c. *Jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah*, seperti: pelayanan kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, utilitas, dan jasa keamanan.
- d. *Pengaruh-pengaruh eksternal*, seperti: perdagangan global, bantuan luarnegeri, tren dan selera masyarakat dunia, teknologi, dan informasi.
- e. *Sosial dan kultur*, seperti: demografi, selera konsumen dan sikap terhadap bisnis.
- f. *Iklm serta lingkungan alam*, misanya: sumberdaya alam, cuaca, dan siklus pertanian.

Sedangkan lingkungan langsung adalah lingkungan yang berpengaruh secara langsung terhadap semua kegiatan usaha, diantaranya:

- a. *Pasar*, misalnya: konsumen, tenagakerja, ketrampilan dan teknologi, material dan alat-alat produksi, lokasi, infrastruktur, modal, dan jaringan kerja .
- b. *Regulasi dan birokrasi*, seperti: undang undang, peraturan peraturan, tarif pajak dan sistem perpajakan, lisensi dan perijinan, standar produk danproses, serta perlindungan konsumen dan lingkungan.
- c. *Intervensi-intervensi yang didanai oleh uang publik*, antara lain: jasa keuangan untuk bisnis.

Dengan otonomi daerah yang telah berjalan apakah telah membawa iklim usaha yang kondusif bagi daerah? Terdapat empat elemen kunci yang harus dianalisis, yaitu: perizinan dan birokrasi, sumbangan dan pungutan (baik formal maupun informal), isu tenaga kerja dan perburuhan, serta arah dan orientasi kebijakan otonomi daerah.

Sedangkan lima kriteria yang digunakan untuk menganalisis efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan yaitu: kecepatan, transparansi biaya, biaya total perizinan, transparansi prosedural dan persyaratan berkas.

Survei yang dilakukan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang meneliti pentingnya faktor lokasi dalam perspektif kalangan usaha di daerah seperti kualitas infrastruktur dan angkatan kerja di daerah menyatakan bahwa faktor politik lokal merupakan variabel yang sangat berpengaruh dalam penciptaan iklim usaha di daerah.

Evaluasi selanjutnya menunjukkan bahwa iklim investasi di daerah masih jauh dari kondisi normal atau dapat dikatakan belum sehat, yaitu menyangkut relatif rendahnya pelayanan pemerintah, kurangnya kepastian hukum, serta peraturan-peraturan daerah yang tidak pro-bisnis.

Institusi merupakan faktor yang penting dalam membangun iklim usaha yang baik di daerah, karena dengan institusi yang baik akan menciptakan kepastian dalam berinvestasi, baik itu mengenai biaya dan lamanya perizinan, besaran pajak, kepastian hukum di daerah, serta menghindarkan investor dari pungutan-pungutan liar yang tidak resmi.

D. Memasarkan Daerah

Ada empat aktivitas utama yang dapat dilakukan dalam memasarkan suatu daerah di antaranya yaitu:

- a. Mengembangkan *positioning* yang kuat dan menarik.
- b. Merancang insentif yang menarik bagi investor baru maupun yang sudah ada.
- c. Menawarkan produk dan jasa secara efisien dan bisa diakses dengan mudah.
- d. Mempromosikan daya tarik dan manfaat daerah

Dalam praktiknya, paling tidak ada empat strategi yang dapat dilakukan untuk menarik investasi (baik perorangan maupun industri) ke suatu daerah, yaitu:

- a. *Image Marketing: image* (citra) merupakan kepercayaan, ide, ekspresi yang dimiliki orang terhadap suatu daerah. Citra adalah sekedar simplifikasi dari begitu banyak informasi yang berhubungan dengan suatu daerah. Contohnya adalah citra Kasongan yang tidak bisa lepas dengan kerajinan gerabah.
- b. *Attraction Marketing: atraksi* (daya tarik) merupakan alasan penting bagi wisatawan, investor dan modal banyak masuk ke daerah. Daya tarik ini dibagi menjadi sumberdaya alam dan buatan manusia. Lebih jauh, klasifikasi tersebut dibagi lagi menjadi dua, yaitu atraksi berdasarkan lokasi dan atraksi yang nyata karena merupakan peristiwa. Kita dapat melihat bahwa atraksi lokasi dan peristiwa dapat menjadi aktivitas yang komplementer di daerah. Misalnya festival kesenian daerah.
- c. *Infrastructure Marketing: infrastruktur* merupakan dasar utama dalam memasarkan daerah. Apapun yang telah dilakukan daerah tidak ada artinya tanpa diikuti oleh tersedianya prasarana dan sarana yang mampu menarik orang, investasi dan modal. Yang perlu ditekankan dalam mempromosikan infrastruktur adalah aksesibilitas, yaitu kemudahan untuk datang, mencakup jalan, angkutan, bandara, pelabuhan, dan telekomunikasi. Selain itu diperlukan juga kualitas infrastruktur, yaitu seberapa jauh sumberdaya modal, sumberdaya modal fisik, serta prasarana mendukung aktivitas ekonomi yang telah tersedia.

*People Marketing: strategi memasarkan daerah dengan cara memasarkan orang, dengan menampilkan di antaranya *pimpinan daerah* (misalnya Sri Sultan HB X sebagai Raja Jawa sekaligus sebagai Gubernur DIY) atau *sikap masyarakat*, misalnya keterbukaan masyarakat lokal terhadap unsur-unsur dari luar (orang, investasi, produk dan industri).*

DAFTAR PUSTAKA

- ADB**; 2005; *Jalan Menuju Pemulihan "Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia"*; www.adb.org/statistics/pdf/ICS-Brochure-Indonesia.
- BKPM**; 2005; *Perkembangan Persetujuan Penanaman Modal*; berbagai edisi, www.bkpm.go.id
- Dumairy**; 1996; *Perekonomian Indonesia*; Erlangga Jakarta.
- Hasan, Nyimas Halimah**; 2007; *Penerapan UU Penanaman Modal: Peran Warga Indonesia di UK*; disampaikan pada "Workshop Menjadi Duta Ekonomi Bangsa", yang diselenggarakan oleh ICMI-London, 8 Juli 2007. <http://images.sohadi.multiply.com/attachment/>.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)**; 2003; *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia: Persepsi Dunia Usaha*.
- Purwanto, Antonius**; 2006; "Pengurusan Izin Rumit dan Mahal"; Kompas, Bisnis & Keuangan, Selasa, 21 Pebruari, halaman 21.
- Sukirno, Sadono**; 2006; *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*; Kencana, Jakarta.
- Tulus Tambunan**; 2006; *Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi*; Kadin-Indonesia – Jetro (2006), www.kadin-indonesia.or.id
- World Bank**; 2005a, *Iklim Investasi yang Lebih Baik bagi Setiap Orang*; Laporan Pembangunan Dunia 2005, The World Bank, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- World Bank**; 2006; *Memahami Investasi Langsung Luar Negeri*; <http://dte.gn.apc.org/fifdi.htm>.